



PENYULUHAN PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Yizreel Junus Kende¹

¹Universitas Mulia, Balikpapan
Email: yizreelyunus@gmail.com¹

ABSTRAK

Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sangat penting bagi kelangsungan pembangunan desa. Salah satunya adalah membantu penyusunan rencana pembangunan dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif. Pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan kapasitas para Pendamping sebagai Kader Pendampingan Masyarakat Desa (KPMD) yang menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan berkomunikasi langsung dengan Satuan Tugas (Satker) PNPM Kantor kecamatan Alalak Prov Kalimantan Selatan. Ini mengharuskan mitra untuk memahami bahwa perubahan lingkungan eksternal harus diimbangi dengan kemampuan internal yang memadai. Baik keterampilan administrasi maupun pelaksanaan keterampilan teknis/komunikasi dengan masyarakat/pejabat/tokoh masyarakat, koordinasi dan fasilitasi. Pendampingan ini dengan metode penyuluhan langsung dan hasil pendampingan ditemukan bahwa para kader dapat memahami kinerjanya untuk mengembangkan daerahnya, adapun Kesimpulan kegiatan ini di laksanakan adalah untuk mengedukasi para Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk pembangunan desa yang lebih baik

Keywords : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

ABSTRACT

The role of Village Community Empowerment Cadres (KPMD) is very important for the continuity of village development. One of them is to assist in the preparation of development plans and facilitate participatory development planning deliberations. This training was held to increase the capacity of the Assistants as Village Community Assistance Cadres (KPMD) who drive community empowerment and communicate directly with the PNPM Task Force (Satker) Alalak sub-district office South Kalimantan Province. This requires partners to understand that changes in the external environment must be balanced with adequate internal capabilities. Both administrative skills and implementation of technical/communication skills with community/officials/community leaders, coordination and facilitation. This assistance is with direct counseling methods and The results of the mentoring were found that the cadres could understand their performance to develop their regions, while the conclusion of this activity was to educate the Village Community Empowerment Cadres for better village development

Kata Kunci : Village, Community, Empowerment and Cadres

LATAR BELAKANG PENGABDIAN

Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sangat penting bagi kelangsungan pembangunan desa. Salah satunya adalah membantu penyusunan rencana pembangunan dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif. Artinya, KPMD berperan sangat penting sebagai fasilitator masyarakat ketika

mencermati peluang dan permasalahan kebutuhan sosial dan sumber daya pembangunan desa serta merumuskan langkah-langkah alternatif bersama masyarakat yang dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan.

Herdayani, F., & Supardi, S. (2021). Pembangunan desa bukan saja merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah melalui perangkat-perangkatnya yang telah ada, tapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak. Dan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. (Irfan Muh:2020) dan Widiya, Ningsih (2023) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen-dokumen terkait dengan peran kader pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, dengan mengacu pada variabel dan indikator kajian dalam kegiatan ini, berikut disajikan temuan-temuan yaitu

1. Tahapan Desain Program

Mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan sumber daya sendiri Komunitas, kerangka kerja pemberdayaan masyarakat berjalan sendiri di forum Musyawarah Desa (MusDus). Dewan Dusun dilaksanakan pada tahap awal di semua desa peserta: Ketua RT, perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan perempuan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh perangkat desa Perangkat desa, namun kemudian rapat dipimpin oleh kader Pemberdayaan masyarakat. Proses diskusi dilakukan secara terbuka melalui donasi Temui peserta seluas mungkin untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan serta potensi mereka. Sejauh ini telah digunakan sebagai kriteria Jumlah penerima manfaat program menentukan prioritas di lingkungan tertentu. Kemudian hasil pertemuan itu dibawa ke pembahasan tingkat DPR untuk pertemuan atau diskusi di tingkat desa (Musdes). Di Musdes lihat dan didiskusikan bersama dengan semua program di setiap desa. Dengan Akibatnya, program A-Village tertentu mungkin diprioritaskan yang pertama, namun di desa B prioritas terakhir karena banyaknya penerima manfaat Manfaatnya berbeda. Hasil penyusunan program dan hasil prioritas program Tinta disusun dan dicatat sebagai rencana pengembangan semester Sekolah Menengah Tingkat Desa (RPJM-Des). Merujuk pada Pasal 9 Permendagr No.7 Tahun 2007 tentang bingkai Pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini Kader PNPM telah melakukan tugasnya poin Identifikasi masalah, kebutuhan dan sumber daya termasuk pembangunan, Perlindungan dan Upaya bersama masyarakat dengan lembaga masyarakat Pemerintah desa Penyusunan rencana pembangunan dan mendorong pertemuan perencanaan pembangunan partisipatif berjalan dengan baik Prosesnya dimulai dari Musdus ke Musdes dan Diproduksi oleh RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Langkah selanjutnya dari hasil dipresentasikan ke pertemuan Negosiasi Antar Desa (NAD)

2. Tahapan Pengorganisasian

Pasal 2 ayat 1 Permendagri No. 7 tahun 2007 menyatakan bahwa KPM dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Dalam Permendagri No. 7 Tahun 2007, pasal 4(e). KPM ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Itu masuk akal KPMD harus bertanggung jawab kepada Kepala

Desa/Lurah. Jaringan Lurah dan KPM benar. Unit peran diperlukan Kepala desa dalam berbagai program yang datang ke desa. Apapun programnya Baik melalui APBD atau sumber lain, lebih baik menempatkan kepala desa sebagai salah satu kepala desa. Kepala desa mungkin memiliki informasi yang paling lengkap Implementasi program di daerah. Jika mereka tidak terlibat dan ada Permasalahan pelaksanaan program tentu saja menyulitkan SKPD pemilik program

3. Fase Implementasi

Peran KPMD dalam kegiatan pembangunan partisipatif telah menunjukkan hasil. Dalam kasus Sistem Penilaian Kinerja pegawai (SPKP), misalnya, beberapa outlet meraup keuntungan dari pinjaman tersebut beberapa meminta lebih banyak kredit untuk putaran kedua. itu dating Disetujui oleh TPK asalkan dana tetap tersedia. Apa yang terungkap di sini Masyarakat mengakui manfaat dari program tersebut dan berbagi keberhasilannya program SPP. Pengendalian sosial program SPKP juga berjalan dengan baik. masalah ini terlihat melalui sanksi sosial bagi kelompok dengan persyaratan kredit

4. Tahap pemantauan dan evaluasi

Tahapan pemantauan dan evaluasi kegiatan PNPM direncanakan secara ketat. Harus ada laporan kemajuan dan pelaksana program tentang ini setiap minggu KPM dan TKP serta pemandu desa dan wilayah memiliki jadwal pertemuan rutin Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting sembuh Ini sangat diperlukan setelah akhir program dan membutuhkan pemeliharaan. Partisipasi masyarakat dalam perawatan, diperlukan Semoga kedepannya dengan partisipasi masyarakat Di area pemeliharaan, manfaat program semakin terlihat banyak orang baik dari daerah maupun generasi. Perhatikan pentingnya Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan, Pasal 9 Permendagri 2007 Butir (h) No. 7 memerlukan perhatian khusus dari KPM.

5. Harapan Kerangka Komunitas

Hasil wawancara dengan penerima manfaat (pemagang dan kios). peminjam, masyarakat mendapat manfaat dari keberadaannya KPM Program terencana dengan baik, sosialisasi program lebih kuat masyarakat dan mulai mengembangkan rasa memiliki program untuk berlari Itulah sebabnya orang memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan lebih banyak dari jumlah pasukan. Menurut komunitas, regu memiliki dua kemampuan penting Bertindak seperti pasukan (pintar) dan Anda akan punya waktu untuk berlari peran (kober). Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari smart dan kober Persyaratan untuk karir skuad dijelaskan menurut komunitas. Beberapa Kualifikasi Skwad berdasarkan kotamadya:

- a. orang lokal
- b. Setidaknya pendidikan SMA
- c. Usia antara 25-40
- d. Rajin
- e. Bersedia bekerja penuh waktu.
- f. Berdasarkan temuan Kemenkes saat ini, kecuali untuk kondisi seperti Di bawah mediasi masyarakat di atas, kader harus memiliki dan mampu:
- g. Bekerja secara mandiri
- h. Anda memiliki jiwa wirausaha
- i. Bisa memimpin dan

- j. dapat berkomunikasi

METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan metode pembuktian dan dukungan kecamatan Alalak Prov Kalimantan Selatan langsung, Pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan kapasitas para Pendamping sebagai Kader Pendampingan Masyarakat Desa (KPM) yang menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan berkomunikasi langsung dengan Satuan Tugas (Satker) PNPM Kantor kecamatan Alalak Prov Kalimantan Selatan Ini mengharuskan mitra untuk memahami bahwa perubahan lingkungan eksternal harus diimbangi dengan kemampuan internal yang memadai Baik keterampilan administrasi maupun pelaksanaan keterampilan teknis/komunikasi dengan masyarakat/pejabat/tokoh masyarakat, koordinasi dan fasilitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Pulau Alalak adalah sebuah delta yang terletak di Sungai Barito yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau Alalak terletak di sebelah barat laut Kota Banjarmasin. Pulau ini memiliki luas sekitar 173 hektare, dimana sejak 1968, pulau ini terbagi menjadi 3 desa secara administratif, yaitu Desa Pulau Alalak, Desa Pulau Sewangi, dan Desa Pulau Sugara. Meski bernama demikian, ketiga desa tersebut berada di Pulau Alalak dan bukan tiga pulau terpisah. Pulau ini dekat dengan Pulau Anyar, yang kerap dijadikan tempat persinggahan nelayan sungai Barito, dan Pulau Bakut yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk ekosistem *mangrove*, termasuk pelestarian monyet ekor panjang dan bekantan Masyarakat di sini banyak yang menggantungkan hidup sebagai buruh di tempat penggajian kayu, dimana kayu ini akan diolah dalam industri mebel dan perahu. Maka tidak heran, di pulau ini banyak terdapat industri pembuatan perahu, baik *jukung* maupun *kelotok* yang merupakan perahu asli dari Kalimantan Selatan. Perahu-perahu ini sering dipakai warga sebagai moda transportasi untuk melakukan aktivitas ke pulau sekitar

Sejak tahun 2006 Pemerintah Republik Indonesia membentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dimana dalam program ini Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bekerja sama untuk memilih kader yang akan membantu pelaksanaan pembangunan Desa-desa dan Kelurahan di seluruh Provinsi di Indonesia

Dalam rangka mencapai visi misi PNPM, strategi yang dikembangkan PNPM yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa, melalui PNPM diharapkan dapat menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Penegasan beberapa hal terkait dengan Tugas dan komitmen kerja melalui pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan di Kalimantan Selatan antara lain :

- a. Pelatihan ini digagas sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping sebagai Kader Pendampingan Masyarakat (KPM) Desa, sebagai ujung tombak pelaksana Pemberdayaan Masyarakat, selain sebagai juga upaya komunikasi langsung dengan Satuan Kerja (satker) PNPM Kalimantan Selatan. Hal ini perlu pendamping pahami,

bahwa berubahnya Lingkungan Eksternal perlu diimbangi oleh kemampuan internal yang memadai : baik itu manajerial, skil ketrampilan maupun teknis implementatif/ cara-cara berhubungan dengan masyarakat/ aparat/ tokoh-tokoh masyarakat, koordinasi dan fasilitasi. Berubahnya lingkungan eksternal yaitu meningkatnya tuntutan dan kualitas kebutuhan, maka dari itu satker (baik kabupaten/ Provinsi) maupun kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) sebagai pemandu program di lapangan harus meningkatkan kepekaan dan respons yang signifikan.

- b. Pelatihan kali ini lebih pantas disebut sebagai pelatihan penyegaran, yaitu berusaha mereview kembali pengalaman keberhasilan dan kegagalan untuk dibahas bersama dengan melakukan sharing antar wilayah kerja yang dipandu para pelatih.

Yang perlu disampaikan sebagai penguatan wawasan disini, antara lain :

PNPM Mandiri Perdesaan dijalankan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat disini dipahami sebagai proses bukan tujuan, artinya PNPM MPd dijalankan melalui mekanisme dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM) sebagai proses demokratisasi pembangunan perdesaan.

1. “**Dari**” dalam masyarakat sendiri digerakkan berbagai kegiatan yang dibutuhkannya.
2. “**Oleh**” masyarakat sendiri pengelolaan kegiatan-kegiatannya.
3. “**Untuk**” memenuhi kebutuhan “**Masyarakat**” sendiri dan sekitarnya.

Gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat akan terjadi jika dalam masyarakat itu sendiri ada warga desa/kelurahan yang tahu, mau dan mampu berperan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Salah satu penggeraknya adalah KPMD yang memproses pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Penentuan jenis kegiatan melalui forum musyawarah masyarakat desa dan kecamatan (Perwakilan Desa-desa) dimana partisipasi masyarakat menentukan pengambilan keputusan kegiatan, ini disebut partisipatif. Lembaga yang dibentuk dalam PNPM MPd dan pengelolaannya oleh masyarakat setempat, seperti BKAD, UPK, BP-UPK, TPK maupun Pokmas.

Peran KPMD secara umum adalah pemroses atau fasilitator manajemen pola pemberdayaan masyarakat. Adapun pokok-pokok peran KPMD dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini :

1. **Pelopop**, yaitu yang merintis atau memelopori gagasan-gagasan kebiatan pemberdayaan masyarakat.
2. **Penggerak**, yaitu yang memotivasi, mendorong dan menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. **Pembimbing**, yaitu yang memfasilitasi, membelajarkan, memberi masukan atau mendampingi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. **Perencana**, yaitu yang memroses perencanaan kegiatan secara partisipatif, mulai dari masalah kebutuhan, prioritas dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. **Perantara**, yaitu yang menghubungkan-hubungkan antara berbagai kepentingan atau antara kebutuhan dengan sumber daya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. **Pelaksana**, yaitu melaksanakan hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh warga masyarakat.
7. **Pelaksana**, yaitu melaksanakan hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh warga masyarakat.

8. **Pembaharu**, yaitu yang memperbaiki atau memperbaharui kegiatan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik atau lebih unggul. Sedangkan kedudukan KPMD di desa / kelurahan, sebagai/ berikut :
 - a. KPMD sebagai Tim Kerja berkedudukan di desa/kelurahan yang bersangkutan
 - b. KPMD sebagai Tim Kerja yang membantu Pemerintah Desa/ kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Partisipatif.
 - c. KPMD sebagai Tim Kerja melekat dalam proses manajemen pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan 7 (tujuh) pokok perannya.

Hubungan kerja KPMD dengan Kepala Desa atau Lurah, Lembaga kemasyarakatan, kader teknis dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif. Rinciannya seperti berikut ini :

- a. KPMD dengan Kepala Desa atau Lurah, yaitu membantu teknis manajemen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. KPMD dengan lembaga kemasyarakatan, yaitu membantu atau bersama-sama memproses seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- c. KPMD dengan KPM lainnya, yaitu kerjasama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- d. KPMD dengan kader teknis, yaitu sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- e. KPMD dengan kelompok masyarakat, yaitu memberikan pendampingan (fasilitasi) dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- f. Disamping tersebut diatas, perlu mendapat perhatian bagi para kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), antara lain : PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Timur membutuhkan KPMD yang berkomitmen terhadap orang miskin dan siap belajar bersama masyarakat, oleh karena itu yang bergabung dengan PNPM MPd disini adalah orang-orang pilihan, berkomitmen dan mau membantu rakyat miskin di desa-desa dengan segala konsekuensinya.

Komitmen seorang KPMD adalah menjadi manusia pemberdaya. Manusia Pemberdaya harus memiliki jiwa egalitarian, soliditas dan empaty. Dalam langkah kerja sehari-hari dicerminkan pada nilai Penghormatan hak-hak rakyat atas pembangunan, perilaku yang demokratis dan komunikasi santun. Dengan kata lain, bahwa seorang KPMD harus memiliki ketrampilan mengarahkan, memediasi dan komunikasi serta memiliki jiwa kepemimpinan.

Sehingga seorang KPMD dapat bekerja dengan rasa persaudaraan dan berperilaku sebagai pengarah tujuan. Adapun dokumentasi kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan untuk mencapai masyarakat berdaya, maka ukuran seorang KPMD dapat dikatakan berhasil, jika:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat adalah kepercayaan (*Trust*), dan kepercayaan tumbuh karena ada *transparansi* dari pelaku-pelaku pembangunan, maka jika trust telah tumbuh pendampingan masyarakat dinyatakan berhasil;
2. Masyarakat mampu mengambil keputusan kegiatan. Jika masyarakat telah mampu apa yang baik dan prioritas bagi masyarakat, maka masyarakat telah mandiri dan pendampingan dinyatakan berhasil;
3. Terjadinya kemitraan antar kelompok masyarakat. Keberhasilan KPMD dapat dilihat dari hubungan antar kelompok masyarakat yang semakin sinergi. Jika masyarakat telah bersinergi maka kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) telah berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alinsky, Saul D. (1971). *Rules for Radicals A Practical Primer for Realistic Radicals*. New York: Vintage Books.
- Batubara, Rido Miduk Sugandi; Rusandi, Andi; Yusuf, Muhammad; Roroe, Pingkan Katharina; Sidqi, Muhandis; Sinaga, Simon Boyke; Solihin, Akhmad (2015). *Kalimantan Selatan: Antara Laut Jawa dan Selat Makassar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 1–4
- Breton, Margot. (1994). *On the Meaning of Empowerment and Empowerment-Oriented Social Work Practice: Social Work with Groups*. Chambers, Robert. 1983. *Rural Development Putting the Last First*. Longman Inc.
- Eko, Sutoro (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press. lfe,
- Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia:
- Friedman, Jhon, (1992). *Empowerment, The Politics of Alternative Development*, Cambridge Blackwell Publishers Green,
- HERDAYANI, F., & Supardi, S. (2021). Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *WIYATA PRAJA: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 23-31.
- Irfan, Muh, et al. "Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kpmdd) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene." *Journal Pegguruang*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 76-81, doi:[10.35329/jp.v2i2.1628](https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1628)
- Longman lfe, Jim. (2013). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- John.J (2016). *Community Development and Social Development: Informing Concepts of Place and Intentional Social Change in a Globalizing World*. Journal Research on Social Work Practice. Sage Publication
- Widiya, Ningsih (2023) *PENGARUH PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMDD) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*. Diploma thesis, Universitas Andalas